



Perkembangan Ekonomi di Indonesia Melalui Kebijakan Moneter Syariah

Kaila Zulfa Khoirurrizki

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Putri Karina Sabila

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Zakia Khoirunisa

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

M. Taufiq Abadi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Email : kaila.zulfa.khoirur.rizki@mhs.uingusdur.ac.id¹, putri.karina.sabila@mhs.uingusdur.ac.id², zakia.khoirunisa@mhs.uingusdur.ac.id³, Muhhammad.taufiq.abadi@uingusdur.ac.id⁴

Abstract. *The Islamic economic system can contribute to world economic growth, including in Indonesia. The purpose of this article is to analyze monetary policy in Indonesia from an Islamic economics perspective. This research examines monetary policy instruments, namely open market operations, with the aim of encouraging economic growth and stabilizing inflation. The method used is a literature review in three main journals and several articles in national and international journals about Islamic finance. The main focus of this research is monetary policy in Indonesia, which has a significant impact on the country's economic growth. The Islamic economic system can contribute to world economic growth, especially in Indonesia.*

Keywords: *Monetary, Islamic Economics, Economic Development, Inflation, Open Market Operations*

Abstrak. Sistem ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Tujuan Artikel ini, untuk menganalisis kebijakan moneter di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini mengamati instrumen kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi inflasi. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan pada tiga jurnal utama dan beberapa artikel di jurnal nasional dan internasional tentang keuangan syariah. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan moneter di Indonesia, yang mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia.

Kata kunci: Moneter, Ekonomi Islam, Perkembangan Ekonomi, Inflasi, Operasi Pasar Terbuka.

Received November 30, 2023; Revised Desember 27, 2023; Januari 2, 2024

*Corresponding author, e-mail address

LATAR BELAKANG

Stabilitas perekonomian dalam negeri dapat dicapai dengan meningkatkan kesehatan sektor keuangan. Berlanjutnya Inflasi dan percepatan pertumbuhan PDB merupakan tujuan akhir dari implementasi kebijakan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekonomi merupakan salah satu dari beberapa jenis kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh suatu negara untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut (Sugiono, 2004). Keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada umumnya berdampak negatif terhadap persepsi perputaran uang dalam perekonomian. Pengaturan percepatan perputaran uang di masyarakat dalam bentuk peredaran uang, suku bunga kredit, nilai tukar, dan variabel ekonomi dan keuangan lainnya (Warjoyo, 2004). Variabel-variabel ini digunakan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia (BI) untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan moneter. Instrumen yang digunakan BI untuk memantau aktivitas moneter serupa dengan Instrumen Operasi Pasar (Ramandhani & Abadi, 2023).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap instrumen OPT yang digunakan BI menyimpulkan bahwa setiap instrumen mempunyai hubungan dengan instrumen sebelumnya. Akan tetapi, impuls pasar uang antar bank, khususnya respon syariah terhadap instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sangat seimbang, tetapi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merespon negatif dan lebih seimbang, oleh SBI yang bersifat konvensional. Temuan lain menunjukkan bahwa SBI, SBIS, Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) berdampak positif terhadap jumlah uang beredar (M2) masyarakat umum (Rachman & Sri Herianingrum, 2016). Meskipun demikian, mata uang tersebut digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi pada saat penulisan adalah fiat. Uang fiat dianggap sebagai alat tukar tidak ada nilai intrinsik dan cenderung melahirkan sistem ribawi yang dilarang (Abadi, 2022).

Namun, saat ini, mata uang fiat merupakan satu-satunya indikator terpenting pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 4.99 persen, dengan rincian tahun 2014 tumbuh sebesar 5.01 persen, 2015 sebesar 4.88 persen, 2016 sebesar 5.03 persen, dan PDB Indonesia sebesar 5.07 persen pada tahun 2017 (Bank Indonesia, 2018). Pada periode yang sama, rata-rata tingkat inflasi aktual Indonesia sebesar 4,58 persen, dengan rincian pada tahun 2014 sebesar 8,36 persen, kemudian turun menjadi 3,35 persen pada tahun 2015, 3,02 persen pada tahun 2016, dan 3,61 persen pada tahun 2015 (Nasional, 2018). Dampak negatifnya antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi, baik dari yang harus dibenahi oleh suatu negara guna menstabilkan kondisi perekonomian dalam negeri (Widayah & Abadi, 2023).

Negara bermuara kepada bagaimana negara dapat menciptakan dan memberikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kebijakan ekonomi moneter. Kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat ketika kepentingan konsumen dan kepentingan produsen dapat terpenuhi dengan baik atau produksi dan konsumsi dalam keseimbangan keadaan keseimbangan. Keseimbangan ekonomi terjadi ketika pihak kedua dan ketiga mendapatkan keuntungan dari transaksi ekonomi yang dilakukan. Oleh karena itu, beban bunga dari pemanfaatan uang fiat sebagai alat dalam menjalankan kebijakan moneter perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan skema yang tepat agar keseimbangan riil ekonomi dapat tercapai dengan baik. Dari grafik di atas terlihat persepsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terus meningkat, padahal data

internal/unit menunjukkan bahwa program OPT memberikan dampak yang signifikan. Instrumen pokok yang dimiliki oleh negara dalam kebijakan moneter adalah pertukaran uang di pasar uang dengan tingkat penambahan tersebut. Penulis akan menjawab pertanyaan bagaimana ekonomi Islam memandang uang yang digunakan dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT) dengan pendekatan teori uang dan konsep uang dalam perspektif Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan penelitian terhadap data dan literatur yang relevan. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda, artikel ini telah dipecah menjadi beberapa bagian. Manfaatnya antara lain peningkatan aktivitas perekonomian di Indonesia dan OPT, serta pengetahuan dan konsep uang yang berkaitan dengan Islam, dan pada bagian akhir artikel ini akan dibahas hubungan antara OPT dan uang menurut Islam.

KAJIAN TEORITIS

Pada penelitian ini akan membahas mengenai analisis kebijakan moneter di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini mengamati instrumen kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka (*open market operation*), dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi inflasi. Kebijakan moneter di Indonesia, yang mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Istilah lain yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan studi kepustakaan (*library study*). Pendekatan ini untuk menganalisis dokumen terkait kebijakan moneter, terutama instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT). Selain itu, membaca literatur yang relevan, seperti teori tentang uang yang muncul dari ilmu ekonomi konvensional dan Islam, memperkuat tren ini. Menyusul kajian literatur dan teks dengan topik pembelajaran untuk menimba ilmu dan pemahaman, artikel ini mengawali pembahasan teoritis tentang bagaimana mata uang fiat digunakan sebagai dasar kebijakan moneter suatu negara (Abadi & Misidawati, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ekonomi negara

Terdapat perbedaan antara dua paradigma dalam analisis makro ekonomi setelah kematian Keynes. Pada awalnya, ilmu ekonomi arus utama atau ekonomi neo-klasik didasarkan pada asumsi makro bahwa aktivitas ekonomi dilakukan oleh individu; fungsi produksi yang berkontribusi pada pasar yang berkembang, sehingga menghasilkan lapangan kerja penuh. Yang kedua adalah post-Keynesian atau strukturalis, yang berpendapat bahwa kelompok yang bekerja sama dengan pemerintah dan data ekonomi dapat diperiksa secara empiris. Mazhab mazhab ekonomi konvensional terus berkembang sesuai dengan perekonomian yang kompleks, terbuka, cepat, dan hubungan antara negara-negara di dunia tidak dapat dihindari (Abadi, 2021).

Perbedaan kedua pandangan tersebut berimplikasi pada kebijakan perekonomian yang harus dilaksanakan oleh masing-masing negara. Perbedaan utama antara teori ekonomi klasik dan modern adalah preferensi terhadap aktivitas ekonomi. Mazhab klasik preferensi mengambil jalur kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas perekonomian, sedangkan ekonomi modern cenderung memilih kebijakan fiskal sebagai sarana menuju

tujuan kebijakan ekonomi. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mendorong pertumbuhan, pembangunan ekonomi, dan keamanan nasional. Selain itu, jika suatu negara mengambil kebijakan moneter maka lembaga yang dominan adalah bank sentral, sedangkan jika suatu negara mengambil kebijakan fiskal maka lembaga yang dominan adalah Kementerian Keuangan.

Kebijakan Moneter Di Indonesia

Aktivitas ekonomi dan keuangan suatu negara dipengaruhi oleh peran kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan tersebut ditujukan untuk stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, seperti perputaran uang dalam perekonomian; perkembangan peredaran uang; suku bunga; nilai tukar dan lain-lain (Warjoyo, 2004). Sedangkan di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah dengan undang-undang nomor. 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia (BI) adalah mencapai hal-hal sebagai berikut: Menjaga kestabilan nilai rupiah, kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah.

Secara praktis, kebijakan moneter setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:

1. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan pelaku ekonomi;
2. waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi (lag);
3. Perubahan arus pengiriman uang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan keuangan negara.

Oleh karena itu, perbankan harus merespon perubahan perilaku bank sentral dan sektor keuangan harus mengantisipasi perubahan perilaku ini. Jangka waktu yang diperlukan tergantung pada kompleksitas produk keuangan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan moneter. Perubahan arus yang digunakan dalam perekonomian terbuka menyebabkan kondisi moneter dan keuangan yang negatif saling mempengaruhi.

Kompleksitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia setidaknya dapat dijabarkan melalui dua cara, yakni: cara pertama melalui interaksi yang terjadi di pasar keuangan atau interaksi antara Bank Sentral dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam kegiatan keuangan; cara kedua melalui interaksi terkait fungsi intermediasi yaitu interaksi antara bank dengan lembaga keuangan lain dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi di sektor riil. Beberapa saluran yang menjadi dasar kebijakan moneter adalah uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.

Operasi Pasar Terbuka.

Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (government security)(Arief, 1996). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dalam kebijakan moneter, kesejahteraan dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keseimbangan harga, dan neraca pembayaran yang tercermin dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter tersebut, bank sentral mempertimbangkan dua tujuan: tujuan akhir, yang biasanya ditujukan untuk mencapai stabilitas harga dan/atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perkembangan ekonomi suatu negara dari tertutup menjadi terbuka yang memaksa mereka untuk meninggalkan instrumen kebijakan moneter langsung dan memilih instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Di Indonesia, instrumen kebijakan langsung mulai terasa tidak efektif pada awal tahun 1980an, setelah itu kebijakan beralih ke kebijakan moneter tidak langsung. Salah satu kebijakan moneter tidak langsung yang digunakan adalah operasi pasar terbuka (OPT) yang bercirikan jalan keluar. Kebijakan

deregulasi keuangan dan perbankan pada tahun 1983. Secara umum OPT diartikan sebagai pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral baik di pasar primer maupun sekunder dengan tujuan untuk mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang, seperti treasury bills T-Bills, surat berharga bank sentral (central bank bills) dan surat berharga swasta (prime commercial papers). Operasi pasar terbuka adalah alat kebijakan yang umum digunakan. Sebab, instrumen ini merupakan partisipasi otoritas moneter yang berorientasi pasar. Bank dan broker tidak mengikat, arah politik dapat dengan mudah diambil oleh pasar dan tidak membebani bank.

Selain itu, untuk mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang terdapat langkah-langkah kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dapat menyebabkan kontraksi atau perluasan kebijakan moneter. Dalam kondisi kontraksi, BI menjual SBI dan untuk ekspansi, BI membeli kembali SBI (SBI Repo). Dengan kata lain, jika menyangkut likuiditas perbankan maka akan mengalami surplus kemudian BI akan menjual surat berharga. Sebaliknya, jika permintaan uang mengalami surplus maka BI akan membeli surat berharga tersebut. Jual beli surat berharga berarti beban yang harus ditanggung. Jika BI menjual SBI maka beban OPT ditanggung BI, sedangkan jika OPT menggunakan intervensi valuta asing maka tergantung manajemen baik BI maupun pemerintah.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mencapai puncaknya pada tahun 2007 sebesar 245,328 miliar rupiah, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mencapai puncaknya pada tahun 2009 sebesar 4,341 miliar rupiah. Sedangkan FASBIS mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu mencapai 460 persen dalam periode tersebut. 4 tahun, 3,386 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 15,582 miliar rupiah pada tahun 2012. Sementara itu, fluktuasi dan pertumbuhan eksponensial setiap instrumen yang dilakukan BI menunjukkan adanya upaya kontraksi dan ekspansi dalam mengatur jumlah uang beredar yang beredar.

Sejarah Uang

Pada masa awal peradaban, ketika diasumsikan bahwa manusia tidak mempunyai kelebihan barang dan transaksi menggunakan sistem barter. Dalam keadaan perekonomian, barter merupakan suatu keadaan dimana masyarakat secara langsung menukarkan suatu barang dengan barang lain. Ketika beberapa pelaku ekonomi dan masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan, maka disepakati untuk menetapkan alat tukar komoditas sebagai alat transaksi. Dengan berkembangnya transaksi sosial ekonomi di masyarakat dan pengaturan uang komoditas yang hanya berlaku secara lokal dan berbeda-beda antar masyarakat, maka timbul permasalahan dalam melakukan transaksi di luar masyarakat. Oleh karena itu, konsensus para pelaku ekonomi saat itu adalah mengidentifikasi alat tukar yang dapat digunakan dalam skala yang lebih besar.

Meskipun uang komoditas banyak digunakan di masyarakat, namun bahan baku emas dan perak dalam bentuk uang logam lebih umum digunakan karena daya tahan dan keandalannya. Koin pertama yang terbuat dari logam mulia, digunakan sebagai uang tak bertanda, muncul sekitar tahun 1000 SM di Cina dan sekitar 700 SM. SM di Yunani. Kemudian koin emas dan perak dicetak pada kedua sisinya, misalnya uang yang dikeluarkan oleh Alexander Agung dengan dewa Athena di bagian depan dan belakang. Penggunaan uang berbasis emas dan perak terus berlanjut hingga pertengahan abad ke-20, namun kini digantikan oleh berbagai bentuk uang.

Dengan semakin meluasnya transaksi ekonomi, maka berakhirlah fase uang logam dan digantikan oleh uang kertas. Kemunculan uang kertas pertama kali terjadi di Tiongkok sekitar tahun 1000 dan di Eropa sekitar tahun 1500 hingga 1700. Pada masa awal, uang kertas didukung oleh tersedianya emas dan perak. Oleh karena itu,

penggunaan uang kertas bertujuan untuk mempermudah transaksi dan transportasi ke berbagai lokasi. Misalnya, pada awal abad ke-20, Amerika Serikat memiliki mata uang kertas berupa sertifikat emas yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas dan perak. Untuk mendapatkan sertifikat emas dan perak, masyarakat harus menukarkan emasnya yang kemudian diganti dengan sertifikat emas dan perak. Untuk memudahkan transaksi pembelian dan penjualan, sertifikat yang dipegang oleh pemiliknya dicatatkan dalam koin emas, yang dalam hal sertifikat emas dan dolar perak dibayarkan kepada beruang sesuai permintaan. Sertifikat ini menunjukkan bahwa penyetoran telah dilakukan oleh Departemen Keuangan (Abadi, 2022).

Perkembangannya, uang dapat dibagi menjadi empat bagian. Yaitu: 1) Commodity money, uang komoditas adalah uang yang memiliki nilai komoditas. Artinya komoditas itu bisa diperjual belikan sebagai barang ketika dia tidak difungsikan sebagai uang. 2) Metallic money, uang logam adalah uang yang terbuat dari logam baik berupa batu mulia, besi, perak, dll. 3) Uang kertas. Jenis uang ini tercipta pertama kali di China pada tahun 910 M sebagai usaha untuk membuat uang lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana, dan 4) Bank money, uang bank kini kita kenal dengan deposito atau rekening perbankan dimana uang yang kita miliki hanya berupa nominal saja, namun kapan saja dapat dimiliki fisiknya. (Hasan, n.d.)

Fungsi Uang

Mata uang yang dikumpulkan Menurut perspektif ilmu ekonomi konvensional, uang adalah sejenis operasi matematika yang berfungsi sebagai perantara dalam transaksi ekonomi, dimana pelaku ekonomi membeli barang dan jasa. Selain itu, uang dapat digunakan sebagai alat turing dan manipulasi moneter. Namun pada kenyataannya, hal ini berarti bahwa fungsi tersebut ditandai dengan penurunan nilai relatif terhadap nilai waktu mata uang, yang akan berdampak buruk pada penurunan keinginan dan ketersediaan mata uang untuk mencapai ambang inflasi dan menurunkan tingkat inflasi. . status quo sebagai pengaman. Di sisi lain, fungsi uang di atas juga mengidentifikasi dua jenis uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari: uang dengan sertifikat dan uang dengan uang fiat. Ditambah dengan mata uang fiat yang tidak berbagaian di dalamnya, mata uang dengan nilai komoditas adalah materi yang dikenal sebagai instrumen perdagangan.

Mata uang yang disebutkan pada awalnya terdiri dari barang-barang acak yang dikemas menjadi alat transaksi, kemudian diklasifikasikan menurut emas dan perak seperti yang disebutkan di atas. Hingga tahun 2023, mata uang tersebut ditukar dan dibandingkan dengan jenis mata uang lain yaitu mata uang fiat. Akibatnya, hampir setiap negara di dunia saat ini menggunakan mata uang ini. Yang dimaksud dengan uang fiat adalah uang yang digunakan sebagai tender yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bunga yang dikenakan untuk mengubah uang fiat tersebut menjadi mata uang yang tidak sama dengan jumlah nominalnya. Dengan kata lain, jika mata uang fiat digunakan untuk keperluan pemerintah, maka nilai atau harganya tidak lagi sama setiap saat.

Berdasarkan fungsi uang di atas, fungsi uang kadang-kadang digunakan dalam pengiriman uang melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT). Menurut Sertifikat Bank Indonesia (SBI), misalnya, SBI yang diinvestasikan oleh Bank Indonesia (BI) merupakan analisis dampak kebijakan pasar uang syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dinilai dengan jumlah nominal yang tetap dan diperdagangkan berdasarkan tingkat bunga simpanan atau margin tetap untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, baik yang membeli, menjual, atau memegang saham SBI yang diinvestasikan. Hal ini juga berlaku untuk instrumen OPT lainnya seperti SUN, SWBI, SBIS, FASBI, Intervensi

Rupiah, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika kita berpegang pada definisi mata uang fiat di atas, maka jika mata uang tersebut adalah mata uang fiat dan digunakan untuk keperluan pemerintah atau tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, maka sistem mata uang nasional pada akhirnya akan mengalami krisis dan kehancuran.

Uang Perspektif Ekonomi Islam

Secara umum uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang, atau alat untuk membeli suatu barang atau jasa. (Ayub, 2009). Dua mata uang logam yang menjadi media penukaran mata uang pada awal era Islam adalah emas dan perak, yang berasal dari penukaran pound Persia terhadap dolar dengan perbandingan 1:10 dan kemudian 1:35, masing-masing. Koin-koin ini berasal dari pound Romawi. Relevansi Dirham dan Dinar: Menurut beberapa ekonom Muslim, kedua mata uang ini memiliki tujuan yang sama saat ini, karena pembayaran zakat dilakukan menggunakan mata uang tersebut. Sebagai contoh, uang digunakan untuk menciptakan nilai yang jelas dan dapat dimengerti dari pertukaran tersebut dan untuk mengurangi kelancarannya. Dalam konteks sekarang, instrumen keuangan yang digunakan dalam kebijakan moneter Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Intervensi Rupiah (IR), Nilai Tukar, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan kewajiban pemerintah sampai dengan yang terakhir menggunakan mata uang.

Alat utama transmisi OPT BI adalah uang, yang memudahkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mempengaruhi harga dengan memprediksi nilai nilai tukar di masa depan dengan menggunakan sistem jangka panjang dibandingkan sistem yang digunakan di pasar mata uang. Dengan cara ini, dibandingkan dengan mata uang fiat, resistensi emas pada aset yang mendasarinya memiliki laba atas investasi harian yang lebih baik dibandingkan mata uang itu sendiri. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa sistem perekonomian global saat ini, yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, telah menjadikan dolar AS (USD) sebagai satuan hitung perdagangan internasional. Saat terlibat dalam perdagangan internasional, investasi, dan perdagangan utang, dolar AS dianggap sebagai alat tukar netral. Dalam perekonomian global saat ini, dominasi dolar AS dalam hal jumlah uang beredar menjadi semakin sulit dipertahankan dalam transaksi ekonomi lintas negara karena fluktuasi dolar yang semakin tidak menentu dan salah. Konsekuensi dari hal ini adalah peningkatan tajam inflasi di negara-negara yang perdagangan globalnya sangat bergantung pada dolar. Sebagai contoh, krisis Asia diakibatkan oleh jatuhnya mata uang yang mendorong terjadinya keajaiban Asia.

Peluang Ekonomi Islam

Ketidakstabilan perekonomian yang terus berlanjut berdampak negatif terhadap kesehatan perekonomian negara. Sejalan dengan sistem yang sudah ketinggalan zaman ini, dolar AS (USD) kini menjadi satu-satunya mata uang yang paling dominan dan banyak digunakan di semua negara di dunia. Seperti disebutkan sebelumnya, mata uang internasional saat ini digunakan sebagai alat devisa, investasi, utang, dan ekspor (Widayah & Abadi, 2023). Sejarah perekonomian dunia menunjukkan telah terjadi 20 krisis ekonomi dalam tahun terakhir. Fenomena ini dijelaskan oleh fakta bahwa negara-negara Muslim memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain dalam hal warisan, sumber daya abadi, tahap pembangunan, dan sistem politik. Namun pendekatan ini didasarkan pada norma syariah yang dimaksudkan untuk mentransformasikan perubahan sosial dengan segala konsekuensinya, tidak hanya sekedar pembangunan gedung baru.

Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (Ajuna, 2017). Akibat dari ketidakseimbangan ini disebut inflasi, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep inflasi yang dikemukakan oleh ekonomi Islam (Sugiono, 2004). Oleh karena itu, cara terbaik untuk memulihkan keadaan perekonomian adalah dengan mengubah formula pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menggeser konsep jumlah uang beredar. Pergeseran tersebut dilakukan berdasarkan teori inflasi yang kurang bermanfaat bagi debitur (debitur) dan akan lebih bermanfaat jika dipadukan dengan teori Qardhul Hasan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran bahwa qardhul hasan adalah alat pembelajaran intrusif yang dapat digunakan untuk mempelajari dan menerapkan mekanisme untuk mencapai hasil. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa sebagian besar produk yang dibeli Bank Indonesia (BI) melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dibayar dengan sistem pencairan (Yusuf et al., n.d.). BI menggunakan rekening murni dan rekening dimuka untuk surat penerbitan, bahkan dalam kasus surat negatif.

Untuk meringankan kesulitan di masa lalu, Chapra telah memberikan beberapa alternatif sebagai landasan kebijakan ekonomi Islam. Alternatif-alternatif yang tercantum di atas cukup mirip dan tidak memberikan keuntungan apa pun bagi negara mana pun jika dipertimbangkan dengan lebih hati-hati. Diantaranya: pertama, Difisit Fiskal, menekankan pada penjumlahan harian Dibandingkan dengan nilai tukar yang stagnan, kurva imbal hasil dapat naik dengan cepat, meningkatkan deviasi nilai tukar riil dan rata-rata, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat inflasi. Kedua, simpanan dasar, yang menjadi dasar sistem perbankan, dan simpanan kontinjen, yaitu jumlah yang diusulkan sehubungan dengan uang tunai yang digunakan bank untuk membiayai kembali pinjaman, merupakan faktor ekonomi utama. Keempat, surplus neraca pembayaran, yang hanya dipandang sebagai negara Muslim kecil yang mendapat manfaat dari surplus neraca pembayaran, Dari perspektif Islam, kebijakan ekonomi yang digerakkan oleh moneter pada dasarnya didasarkan pada evaluasi sistem konvensional, yang sejujurnya tidak mampu memberikan stimulus yang berarti untuk mencapai tujuan pengendalian fiskal. Kontraksi sistem kapitalis membuat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin terasa. Hak-hak individu merupakan aset utama bagi sistem sosial ketika hak-hak tersebut ditegakkan. Oleh karena itu, teori makroekonomi Islam tidak hanya menawarkan pendekatan alternatif dalam melakukan kebijakan moneter, namun juga menggunakan transmisi kebijakan melalui dua sistem konvensional sepanjang relevan dan sejalan dengan tujuan kesejahteraan manusia. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan mencapai sasaran dari sistem ekonomi dalam Islam yakni kesejahteraan dunia dan akhirat (falah). Sasaran (*semi – objectives*) dari kebijakan moneter Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia (*maximize human welfare*).

KESIMPULAN

Salah satu instrumen observasi moneter yang paling sering digunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas perekonomian negara adalah Operasi Pasar Terbuka (OPT). Strategi OPT dapat diterapkan dengan menyebutkan Bank Sentral Indonesia (SBI), Bank Syariah Indonesia (SBIS), Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi Pemerintah, Bank Swasta Indonesia, Intervensi Rupiah (IR), dan Lembaga Keuangan Bank Indonesia (FASBI) yang dijual di bursa.

Mayoritas pengguna surat berharga ini menggunakan sistem diskonto. Sistem ini diterapkan sebagai sarana untuk melacak dan memperluas kebijakan ekonomi dan keuangan. Basis yang digunakan dalam sistem diskonto terdiri dari mata uang fiat dan ambang batas suku bunga. Pengendalian inflasi itu sendiri dapat memberikan pengaruh pada tingkat suku bunga yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Apabila tujuan kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi, maka hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengangguran; namun, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan secara bersamaan juga menaikkan suku bunga acuan dibandingkan dengan suku bunga obligasi yang diperdagangkan.

Selanjutnya, ketika surat berharga tersebut di atas dijual kembali, hal ini memberikan aliran uang yang cepat dan stabil. Oleh karena itu, landasan uang yang digunakan harus diganti dengan menggunakan konsep dan prinsip syariah yang meremehkan nilai uang yaitu produktivitas. Chapra juga menegaskan bahwa komunikasi antara bank sentral dan pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas inflasi. Batasan artikel ini tidak membahas bagaimana pengamat menggunakan implementasi instrumen empiris untuk menentukan produktivitas berbasis moneter. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini nantinya dapat mengkaji bukti empiris penggunaan instrumen syariah dalam kebijakan moneter terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Siregar, 2021).

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*.
- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., & Misidawati, D. N. (2023). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan (Teori, Metode, Implementasi)*. Zahir Publishing.
- Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, 13(1), 104–117.
- Arief, S. (1996). *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Indonesia, "Bank Indonesia," *Bank Indonesia*, last modified 2018. (n.d.).
- Hasan, A. (n.d.). *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. 63.
- Nasional, S. K. N. P. (2018). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2014-2018*.
- Rachman, S., & Sri Herianingrum. (2016). Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap M2 di Indonesia Periode 2009-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan*, V No. 1, 89–90.
- Ramandhani, K., & Abadi, M. T. (2023). Membangun Loyalitas Pelanggan Melalui Promosi yang Efektif Studi Kasus Usaha Kebab di Wonokerto. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(4), 39–50.
- Siregar, E. Y. (2021). KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM. *Al Iqtishad*, 2, 163–175.
- Sugiono, F. X. (2004). *Instrumen Pengendalian Moneter : Operasi Pasar Terbuka*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Warjoyo. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Widayah, W., & Abadi, M. T. (2023). The Influence of Price, Location, and Islamic Business Ethics on the Sales Level of Salsa Batang Shop, Indonesia. *ProBisnis*:

Jurnal Manajemen, 14(1), 40–45.
Yusuf, M., Abadi, M. T., & Asytuti, R. (n.d.). *PENGARUH MARKETING MIX DAN
DIGITAL BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG PEKALONGAN PEMUDA DI MASA PANDEMI.*